



KONSEP DASAR PERATURAN DAN PERUNDANGAN KESEHATAN

NAMA KELOMPOK :

Mahatni Esa Pamela (D11.2023.03726)

Cristie Jaya Wisnu W (D11.2023.03739)

Jovita Reila L (D11.2023.03740)

Fariz Arya Pangestu (D11.2023.03743)

Nova Reyna S (D11.2023.03751)

Naufal Hakam (D11.2023.03762)

Nadiya Putri Septaningrum (D11.2023.03837)

DEFINISI

Peraturan Kesehatan: Aturan dan kebijakan yang dibuat untuk mengatur segala hal terkait kesehatan masyarakat, seperti layanan kesehatan dan pencegahan penyakit, agar semua orang bisa mendapatkan perawatan yang baik.

Perundangan Kesehatan: Hukum dan undang-undang yang mengatur sistem kesehatan, termasuk hak dan tanggung jawab tenaga kesehatan serta perlindungan bagi konsumen, untuk memastikan kesehatan masyarakat terlindungi dan terjamin.

TUJUAN

Tujuan konsep dasar peraturan dan perundangan kesehatan adalah:

1. Melindungi kesehatan masyarakat
2. Menjamin akses layanan kesehatan yang adil
3. Mencegah dan mengendalikan penyakit
4. Menjamin kualitas dan keamanan produk kesehatan
5. Memberdayakan pasien dan melindungi hak-hak mereka

DEFINISI DAN RUANG LINGKUP

Ruang lingkup peraturan kesehatan sangat luas, mencakup:

1. **Pelayanan kesehatan:** Bagaimana pelayanan kesehatan diberikan, mulai dari pusat hingga daerah.
2. **Tenaga kesehatan:** Aturan untuk dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya.
3. **Kesehatan masyarakat:** Cara mencegah penyakit, promosi kesehatan, dan penanganan masalah kesehatan masyarakat.
4. **Sumber daya kesehatan:** Pengelolaan obat-obatan, alat kesehatan, dan anggaran untuk kesehatan.
5. **Jaminan kesehatan:** Sistem yang memastikan semua orang bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, seperti BPJS Kesehatan.

JENIS PERATURAN KESEHATAN

Peraturan Kesehatan

1. **Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes)** : Aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan untuk mengatur berbagai aspek operasional dalam sektor kesehatan.
 - Contoh: Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas.
2. **Peraturan Daerah (Perda)** : Aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur masalah kesehatan di tingkat lokal.
 - Contoh: Perda tentang pengendalian rokok atau kebersihan lingkungan.
3. **Peraturan Kepala Badan (Perka)** : Aturan yang dikeluarkan oleh kepala lembaga pemerintah, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
 - Contoh: Perka BPOM No. 12 Tahun 2017 tentang Distribusi Obat yang Baik.
4. **Keputusan Menteri** : Keputusan yang dibuat oleh Menteri Kesehatan mengenai kebijakan kesehatan tertentu.
 - Contoh: Keputusan tentang vaksinasi.

JENIS PERUNDANGAN KESEHATAN

Perundangan kesehatan

1. **Undang (UU)** : Dokumen hukum yang ditetapkan oleh lembaga legislatif yang menjadi landasan hukum dalam bidang kesehatan.
 - Contoh: UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. **Peraturan Pemerintah (PP)** : Aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang yang lebih tinggi.
 - Contoh: PP No. 40 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional
3. **Peraturan Presiden (Perpres)** : Aturan yang dikeluarkan oleh Presiden yang berkaitan dengan kebijakan kesehatan nasional.
 - Contoh: Perpres tentang pengendalian HIV/AIDS.

JENIS PERUNDANGAN KESEHATAN

Perundangan kesehatan

4. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes)

- Aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan untuk mengatur aspek-aspek teknis dalam sektor kesehatan.
- Contoh: Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas.

5. Peraturan Daerah (Perda)

- Aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur isu-isu kesehatan di tingkat lokal.
- Contoh: Perda tentang pengendalian rokok di suatu provinsi.

IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN

implementasi peraturan dan perundangan kesehatan :

- **Penyuluhan dan Edukasi** : Mengedukasi masyarakat dan tenaga kesehatan tentang peraturan yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan.
- **Pengawasan dan Penegakan Hukum** : Lembaga pemerintah melakukan pengawasan terhadap fasilitas kesehatan, obat, dan makanan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan
- **Penyediaan Infrastruktur** : Menyediakan fasilitas kesehatan yang sesuai dengan standar untuk mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas.

IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN

Tantangan dalam implementasi :

- **Keterbatasan Sumber Daya** : Terbatasnya anggaran, tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan dapat menghambat penerapan peraturan.
- **Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat** : Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam kesehatan dapat mengurangi efektivitas peraturan.
- **Kepatuhan Tenaga Kesehatan** : Beberapa tenaga kesehatan mungkin tidak sepenuhnya mematuhi standar dan peraturan yang ditetapkan, yang dapat mengakibatkan pelanggaran.
- **Pengaruh Budaya dan Sosial** : Kebiasaan dan kepercayaan masyarakat yang beragam dapat mempengaruhi penerimaan dan pelaksanaan peraturan kesehatan

KESIMPULAN

Konsep dasar peraturan dan perundangan kesehatan menekankan pentingnya kerangka hukum yang jelas dalam pengelolaan dan penyelenggaraan layanan kesehatan. Peraturan dan perundangan ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menjamin akses terhadap pelayanan berkualitas, dan mencegah penyebaran penyakit. Berbagai jenis peraturan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri, memiliki peran dan cakupan masing-masing, sementara prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas menjadi landasan dalam pelaksanaannya. Meskipun implementasi menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran masyarakat, keberadaan peraturan kesehatan sangat penting untuk menciptakan sistem kesehatan yang efektif dan responsif. Dengan pemahaman yang baik tentang konsep ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

PERTANYAAN

1. Memastikan Masyarakat Memahami dan Mengakses Hak Kesehatan??

Pemerintah dapat menyosialisasikan hak-hak kesehatan secara luas, meningkatkan literasi masyarakat, menyediakan layanan informasi yang mudah diakses, melibatkan komunitas lokal, dan memastikan pengawasan untuk melindungi hak kesehatan.

2. Penerapan Perda Pengendalian Rokok??

Perda pengendalian rokok diterapkan sesuai kebutuhan daerah. Daerah dengan kasus penyakit pernapasan tinggi cenderung lebih aktif melaksanakan peraturan tersebut, namun tidak semua daerah memiliki kebijakan yang sama.

3. Mengatasi Keterbatasan Sumber Daya??

Dengan memaksimalkan anggaran yang ada, bekerja sama dengan pihak swasta, mendukung tenaga kesehatan melalui insentif dan pelatihan, memanfaatkan teknologi, serta memberdayakan komunitas, pemerintah berupaya agar regulasi kesehatan tetap berjalan baik.

KONTRIBUSI PEMBAGIAN TUGAS

- Membuat makalah :
 - Mahatni Esa Pamela(D11.2023.03726)
 - Nadiya putri septaningrum(D11.2023.03837)
- Membuat PPT :
 - Naufal Hakam (D11.2023.03762)
- Mencari materi :
 - Cristie Jaya Wisnu W (D11.2023.03739)
 - Jovita Reila Luthfiana (D11.2023.03740)
- Menjawab pertanyaan :
 - Fariz Arya Pangestu (D11.2023.03743)
 - Nova Reyna Safitri(D11.2023.03751)



**TERIMA
KASIH**